

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Setting Penelitian

1. Kondisi Geografis Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo

Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo mempunyai luas 1.396.494 m², sedangkan untuk luas bangunannya adalah 181.808 m². Untuk luas wilayah yang lainnya digunakan sebagai lahan pertanian, sekolahan, jalan, makam dan sebagainya.

Adapun batas-batas wilayah desa Pabean adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Desa Tropodo – Waru
- b. Sebelah selatan : Desa Sedati Gede
- c. Sebelah barat : Desa Ngingas dan Desa Sawotratap
- d. Sebelah timur : Desa Semampir dan Desa Tambak Sawah

Tabel 4.1

**Jumlah Penduduk Desa Pabean
Berdasarkan Jenis Kelamin**

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	5.984 jiwa
2.	Perempuan	5.853 jiwa
	Jumlah	11.837 jiwa

2. Kondisi Sosial

Di desa Pabean ini penduduknya terdiri dari penduduk pribumi dan pendatang. Jumlah keduanya tidak jauh berbeda, jumlahnya hampir seimbang. Untuk penduduk pendatang mayoritas dari mereka hanya mengekos atau mengontrak rumah. Jarang diantara mereka yang sudah mempunyai lahan sendiri untuk tempat tinggalnya. Sedangkan untuk penduduk pribumi, mayoritas dari mereka telah mempunyai lahan untuk tempat tinggalnya, walaupun tidak begitu luas.

Meskipun di desa ini ditempati oleh banyak pendatang, namun interaksi antara keduanya tidak begitu bermasalah. Mereka sama-sama menjaga kerukunan antar warga dan saling bekerjasama dalam menyelesaikan kepentingan desa. Sehingga dapat dikatakan bahwa dengan adanya penduduk pendatang ini, maka secara tidak langsung juga membawa pengaruh dan perubahan bagi wilayah ini sendiri.

Selain itu, dapat terlihat juga bahwa ikatan kekeluargaan di wilayah ini masih cukup erat. Hal ini dikarenakan kerukunan dan kesetiakawanan antar warga bagus. Dengan adanya sikap yang demikian itu, maka segala urusan atau pekerjaan yang berat akan menjadi ringan karena ditanggung oleh seluruh warga, begitu pula dengan segala masalah yang ada dapat terselesaikan dengan cepat dan baik.

3. Kondisi Ekonomi

Mayoritas penduduk desa Pabean bermata pencaharian sebagai petani, industri, wiraswasta dan pegawai negeri. Sedangkan kehidupan

ekonomi untuk penduduk di perumahan tergolong ekonomi keatas dan menengah, untuk penduduk di kampung tergolong ekonomi menengah dan kebawah. Hal ini terlihat dari mata pencaharian penduduk di desa Pabean. Untuk di wilayah perumahan mayoritas bermata pencaharian sebagai pegawai negeri dan wiraswasta. Sedangkan di perkampungan mayoritas bekerja sebagai buruh pabrik, pedagang dan petani.

4. Kondisi Keagamaan

Penduduk desa Pabean mayoritas beragama Islam. Selain itu, ada juga yang beragama Kristen, Katolik, Budha dan Hindu. Walaupun mereka berbeda-beda agama, tetapi mereka tetap dapat mempertahankan kerukunan antar umat beragama. Mereka selalu saling menghormati antara warga yang satu dengan yang lain dan menjunjung tinggi asas kekeluargaan. Bagi mereka, kebersamaan juga merupakan hal yang utama. Karena dengan begitu maka mereka akan saling mengetahui dan memahami karakter warga yang lain.

Untuk agama Islam sendiri terdiri dari beberapa aliran, yaitu NU, Muhammadiyah dan LDII. Selain itu, juga ada aliran-aliran kepercayaan yang lain. Meskipun mereka berbeda aliran, kerukunan tetap mereka pegang teguh. Segala perbedaan yang ada, mereka jadikan sebagai suatu hal yang biasa. Selama masih diterima oleh akal, mereka antara satu sama lainnya masih dapat memaklumi segala perbedaan.

Namun, di desa Pabean ini hanya terdapat tempat peribadatan untuk agama Islam, yaitu masjid dan musholla. Sedangkan untuk agama-

yang Dinda lakukan berbeda dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Nita. Kali ini Dinda melakukan pelanggaran, yaitu tidak membawa surat izin mengemudi saat ada operasi yang dilakukan oleh polisi.

Pernah mbak waktu aku ma temenku pulang jalan-jalan, ya biasa anak muda habis nongkrong bareng waktu malam minggu. Waktu itu aku tidak membawa SIM dan STNK waktu operasi. Karena waktu itu setelah lampu merah aku berhenti tapi sebelum lampu hijau nyala aku langsung tancap gas dan gak tau kalau di depan ada operasi.

Dari perbuatannya tersebut, Dinda dan temannya harus mendapatkan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang mereka lakukan. Pada saat itu, mereka mendapatkan sanksi berupa denda sebesar Rp. 35.000. Selain itu, Dinda dan temannya juga mendapatkan peringatan dari polisi. Walaupun pada saat itu mereka masih duduk di bangku sekolah, mereka tetap tidak mendapatkan keringanan. Meskipun Dinda mendapatkan sanksi atas pelanggaran yang ia lakukan bersama temannya, ia tidak merasa kesal ataupun marah kepada polisi yang bertugas. Menurutnya, tiap pelanggaran memang harus ada sanksinya. Bahkan ia juga mendukung yang dilakukan oleh polisi. Karena semuanya itu demi kebaikan pengendara jalan yang lain dan tentu buat dirinya sendiri. Untuk ke depannya, Dinda merasa harus lebih berhati-hati dan memeriksa perlengkapan berkendara, seperti helm, SIM dan STNK. Untuk dampaknya Dinda belum pernah merasakan apa-apa

dikhawatirkan akan memberikan dampak negatif bagi pengendara (pengguna jalan) yang lainnya.

Dinda berkata, “Untuk cara menanggulangnya, polisi harus lebih ketat dan tegas dalam menegakkan hukum”.

Menurut Dinda, selama ini polisi belum begitu tegas dalam memberikan sanksi-sanksi kepada para pelanggar. Kebanyakan dari polisi menerima denda dari para pelanggar langsung di tempat. Padahal itu merupakan cara yang salah. Seharusnya pelanggaran tersebut diurus di kejaksaan, bukan langsung membayar di tempat kejadian.

Sedangkan menurut Kiki, cara menanggulangi pelanggaran lalu-lintas yang terjadi di desa Pabean adalah polisi harus *standby* setiap titik yang terdapat lampu merah, sehingga ketika orang ingin melanggar peraturan lalu-lintas mereka akan berpikir 1000 kali. Menurut Kiki, mungkin cara ini akan berhasil, tapi dia juga tidak dapat memastikan kalau akan berhasil sepenuhnya. Masalahnya, sekarang ini pelanggaran sudah menjadi budaya di kalangan masyarakat manapun, termasuk di desa Pabean. Jadi memang agak sulit untuk mengatasi pelanggaran yang ada, apalagi untuk menguranginya. Hal ini dikarenakan masyarakatnya sendiri juga sulit untuk diatur.

Mas Ismail juga mencoba memberikan solusi atau saran bagi pihak-pihak terkait untuk menanggulangi pelanggaran yang sering terjadi di desa Pabean tersebut.

“Salah satu cara buat ngurangi pelanggaran ya polisi harus sering-sering jaga atau patroli di jalan itu. Atau gak dendanya itu lebih

ditegesin. Yang melanggar harus benar-benar ditilang trus disuruh ngurus di kejaksaan, jangan sampai polisinya terima uang suap gitu. Jadi paling gak itu dapat nyegah orang-orang biar gak ngelanggar lagi.”

Cara yang demikian itu dianggap oleh mas Ismail merupakan salah satu cara yang efektif untuk menanggulangi pelanggaran yang ada.

Selanjutnya, Riri juga menyampaikan pendapatnya tentang cara menanggulangi pelanggaran. Menurutnya, menumbuhkan kesadaran setiap masyarakat memang sangat sulit, dibutuhkan waktu yang lama untuk hal itu. Tetapi, mau tidak mau kesadaran itu harus ada.

“Kesadaran tiap orang lah yang sangat penting. Kalo gak ada itu, semuanya kurang efektif, gak bisa berjalan lancar.”

Menurut Riri, cara itu harus dibantu dengan pengawasan dan pemberian sanksi yang tegas. Dengan begitu kemungkinan besar pelanggaran akan berkurang.

Sedangkan mbak Fitri berpendapat bahwa polisi yang bertugas harus lebih berhati-hati dan teliti dalam mengawasi segala bentuk pergerakan kendaraan. Selain itu, pemberian sanksi harus tegas, tidak boleh ada oknum-oknum polisi yang menerima pembayaran denda di tempat.

Menurutnya, “Petugas polisi yang sedang nglakuin operasi harus tegas mbak kalo mau ngasih hukuman. Yang nglanggar wajib bayar dendanya di tempat seharusnya, ya di kejaksaan itu. Jadi yang mau ngelanggar bakalan pikir-pikir dulu sebelum mereka bertindak.”

3. Teori berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang dipelajari oleh Sosiologi.
4. Suatu teori akan sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi yang penting untuk penelitian.
5. Pengetahuan teoritis memberikan kemungkinan untuk mengadakan proyeksi sosial, yaitu usaha untuk dapat mengetahui ke arah mana masyarakat akan berkembang atas dasar fakta yang diketahui pada masa lampau dan dewasa ini.

Pada penulisan skripsi ini, peneliti menggunakan teori struktural fungsional di mana teori ini mempunyai pandangan bahwa kehidupan sosial itu berlangsung dalam keteraturan, keseimbangan dan keharmonisan yang disebabkan oleh adanya kepatuhan terhadap norma-norma yang telah disepakati, terutama dalam penelitian ini adalah norma hukum.

Menurut Merton, tujuan dari adanya norma-norma yang telah berlaku tidak sepenuhnya dapat mewujudkan kepentingan atau tujuan pribadinya. Selain itu, menurutnya norma tersebut dapat menjadi disfungsi dan bersifat laten maupun manifest.

Norma menjadi disfungsi ketika pengguna jalan tidak menggunakan atau mematuhi peraturan yang ada. Dengan kata lain menyalahgunakannya. Seperti yang telah peneliti temukan dalam data dari berbagai informan yang sering melakukan pelanggaran. Walaupun mereka mengerti makna dari norma yang berlaku, mereka tetap saja melanggarnya.

Sanksi yang diterima oleh para pengemudi yang tidak dapat menunjukkan surat izin mengemudi atau bahkan tidak memunyainya, merupakan dampak dari kesalahan para pengemudi tersebut. Mereka juga telah melakukan disfungsi atas peraturan-peraturan yang ada.

Dalam kenyataannya, secara prosedural berdasarkan ketentuan yang berlaku mestinya proses untuk mendapatkan SIM melalui ujian praktek lapangan yang dipandu oleh petugas kepolisian. Namun, seringkali orang-orang atau pihak-pihak tertentu yang secara sengaja bahkan terkesan aktif memberikan pandangan atau pendapat bahwa untuk mendapatkan SIM bisa atau lebih baik melalui jalan pintas tentu dengan konsekuensi membayar sejumlah uang tertentu.

Padahal sebenarnya jika dihitung-hitung, untuk mendapatkan surat izin mengemudi (SIM) secara prosedur lebih menguntungkan. Hal ini dikarenakan antara waktu, biaya, dan tenaga ternyata lebih menjangkau. Sehingga cara seperti ini sering menjadi kekhawatiran para pengendara jika tidak sesuai dengan bayangannya. Walaupun cara yang benrlah yang lebih menguntungkan, baik dari segi manapun.

Memang untuk dampak dari adanya pelanggaran ini tidak begitu kentara. Karena dampak yang ditimbulkan tidak langsung dapat dirasakan oleh para pengendara. Namun, apabila mereka benar-benar mendapatkan sanksi yang tegas maka kendaraan yang mereka kendarai akan ditahan oleh petugas polisi yang melakukan penyidikan dan bagi pelanggar harus mengurusnya di kejaksaan. Dengan begitu prosesnya akan lebih rumit dan

roda dua akan lebih berhati-hati dalam mengendarai kendaraannya sehingga tidak akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.

Dampak yang serta-merta dapat terjadi adalah kepala akan hancur ketika terjadi kecelakaan lalu-lintas. Karena kecelakaan itu terkadang merupakan kesalahan dari diri sendiri yang kurang berhati-hati di jalan. Di samping itu juga, kecepatan kendaraan yang begitu tinggi terkadang tidak dapat mengontrol diri kita sehingga terjadi kecelakaan tersebut.

Bagi pengemudi kendaraan bermotor ini, diharuskan menggunakan helm yang sesuai dengan ketentuan. Kriteria helm standar adalah:⁵³

1. Tempurung, yaitu bagian yang keras dan halus merupakan bagian paling luar dari helm.
2. Pelindung muka, yaitu bagian muka helm yang dapat melindungi sebagian atau seluruh bagian muka dan terbuat dari bagian yang bening.
3. Lapisan pelindung, yaitu lapisan helm bagian dalam yang dipasang dengan maksud untuk menyerap energi benturan.
4. Lapisan pengaman, yaitu lapisan lunak yang dipasang paling dalam dari helm untuk memberikan kenyamanan pada waktu digunakan dan juga berfungsi untuk melindungi kepala pemakainya.
5. Tali pemegang, yaitu bagian dari helm berupa tali yang dilengkapi dengan kunci pengikat yang berfungsi sebagai pengikat helm dengan kepala pemakainya, sehingga tidak mudah lepas.

⁵³ Kepolisian Negara Republik Indonesia Wilayah Surabaya Resort Sidoarjo, *Produk Undang-Undang Lalu-Lintas (undang-undang no. 14 tahun 1992) tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan*, hal. 4-5.

Adapun sanksi bagi pelanggarnya adalah dipidana kurungan paling lama satu bulan atau diwajibkan membayar denda sebesar maksimal Rp. 1.000.000. Hal ini diatur dalam pasal 61 ayat 1.

Pelanggaran ini merupakan pelanggaran ringan. Namun, dampak dari pelanggaran ini sangat berat. Dengan menerobos lampu merah, maka dapat pula menyebabkan kecelakaan. Jika hal itu sampai terjadi dan diketahui oleh polisi, maka sanksi yang diberikan pun akan semakin berat.

Seperti yang telah diatur dalam pasal 27. Dalam pasal ini dikatakan bahwa pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat langsung dalam peristiwa kecelakaan lalu-lintas harus menghentikan kendaraannya, menolong korban dan melaporkan peristiwa kecelakaan tersebut kepada polisi terdekat. Pengemudi tersebut harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh korban. Namun, apabila pengemudi yang dimaksud tidak bersalah maka pengemudi tidak wajib mengganti rugi, hanya diwajibkan untuk melapor kepada polisi.

Sedangkan sanksi yang akan diterima apabila ketentuan di atas tidak dilakukan adalah pengemudi tersebut akan dipidana kurungan selama enam bulan atau membayar denda maksimal sebesar Rp. 6.000.000.

Kemudian, apabila korban peristiwa kecelakaan tersebut sampai meninggal dunia atau mengalami luka berat sehingga korban tersebut tidak lagi dapat bekerja atau kehilangan mata pencaharian, maka pengemudi kendaraan bermotor tersebut akan diancam hukuman penjara maksimum

menunjukkan surat tersebut, maka pengemudi akan dikenakan sanksi yaitu ancaman hukuman kurungan paling lama dua bulan atau membayar denda maksimal Rp. 2.000.000. Hal ini telah diatur dalam pasal 57 ayat 2.

Dampak yang dapat dirasakan hampir sama dengan ketika seseorang tidak mempunyai surat izin mengemudi. Kendaraan akan ditahan dan dengan terpaksa para pelanggar harus mengurus atau mengambil kendaraannya di kejaksaan dengan biaya yang cukup tinggi dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melalui prosesnya. Oleh karena itu, surat tanda nomor kendaraan (STNK) sangat dibutuhkan. Maka para pengendara haruslah mempunyai surat tersebut agar kendaraannya tidak dinyatakan ilegal.

Sedangkan dari data yang ada, maka peneliti memperoleh temuan yang penting tentang cara menanggulangi pelanggaran lalu-lintas. Menurut beberapa informan yang ada, cara yang dapat ditempuh untuk menanggulangi adanya pelanggaran di Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut:

- a. Adanya pemberian sanksi yang tegas.
- b. Kesadaran hukum yang tinggi
- c. Pengawasan yang lebih ketat dari pihak polisi
- d. Pihak kepolisian memberikan penyuluhan atau pengetahuan tentang tata cara berkendara.

Cara-cara di atas tidak akan efektif jika masyarakat sendiri sebagai pengguna jalan tidak mempunyai kesadaran akan peraturan hukum yang telah

berlaku. Walau bagaimanapun juga, kerja sama antara pihak kepolisian dan masyarakat selaku pengguna jalan sangat diperlukan untuk mengatasi atau mengurangi pelanggaran lalu-lintas yang kerap kali terjadi di masyarakat.

Selain itu, dengan adanya sistem tilang yang berlaku, hal ini mempunyai fungsi manifes dan laten bagi kedua pihak, yaitu pelanggar dan pihak kepolisian. Fungsi manifes bagi pelanggar adalah dengan mereka melanggar maka tujuan mereka yaitu sampai di tempat tujuan dengan cepat dapat tercapai. Sedangkan bagi aparat kepolisian adalah mereka dapat menegur sekaligus memberikan sanksi kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Di samping itu, fungsi laten yang berlaku di masyarakat adalah tidak diharapkan dampak yang negatif atas tindakan menyimpang mereka, yaitu melanggar peraturan lalu-lintas. Mereka tidak menginginkan adanya kecelakaan lalu-lintas ataupun sanksi atas tindakan mereka. Sedangkan bagi aparat kepolisian adalah mereka memberikan denda dan menerima denda damai di tempat dari pelanggar yang di sisi lain dapat menguntungkan maupun merugikan diri pelanggar.

Dalam pelanggaran ini, adanya kesadaran hukum sangatlah diperlukan. Kesadaran hukum merupakan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dan diwajibkan kepada seluruh warga negara untuk menegakkan serta menjamin kepastian hukum tersebut. Sehingga dengan demikian dapat mencegah atau menanggulangi adanya pelanggaran lalu-lintas.

Dalam memperoleh surat izin mengemudi (SIM), calon pengemudi harus melakukan beberapa hal yang sesuai dengan berbagai ketentuan yang berlaku. Berikut syarat-syarat yang harus diperhatikan oleh calon pengemudi dalam memperoleh surat izin mengemudi, yaitu:⁵⁴

1. Mengajukan surat permohonan tertulis
2. Dapat menulis dan membaca huruf latin
3. Memiliki pengetahuan yang cukup mengenai peraturan lalu-lintas jalan dan teknik dasar kendaraan bermotor.
4. Memenuhi ketentuan tentang batas usia, yaitu:
 - a) 16 tahun untuk SIM golongan C (untuk mengemudikan sepeda motor yang kecepatannya lebih dari 40 km/jam) dan D (untuk mengemudikan sepeda motor yang kecepatannya dirancang tidak lebih dari 40 km/jam).
 - b) 17 tahun untuk SIM golongan A (untuk mengemudikan mobil penumpang yang beratnya tidak lebih dari 3.500 kg).
 - c) 20 tahun untuk SIM golongan BI (untuk mengemudikan bus dan mobil barang yang beratnya lebih dari 3.500 kg) dan BII (untuk mengemudikan traktor atau kendaraan bermotor dengan menarik gandengan yang beratnya lebih dari 1.000 kg).
5. Memiliki keterampilan mengemudikan kendaraan bermotor
6. Sehat jasmani dan rohani
7. Lulus ujian teori dan praktek

⁵⁴ Kepolisian Negara Republik Indonesia Wilayah Surabaya Resort Sidoarjo, *Produk Undang-Undang Lalu-Lintas (undang-undang no. 14 tahun 1992) tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan*, hal. 2.

Dalam mengendarai kendaraan bermotor, sebaiknya pengendara memperhatikan beberapa hal. Mereka harus mengecek persiapan yang harus dibawa dalam perjalanan, seperti halnya surat-surat kelengkapan berkendara (SIM dan STNK).

Selain data tentang bentuk-bentuk pelanggaran lalu-lintas, peneliti juga mendapatkan tentang cara menanggulangi pelanggaran yang sering terjadi tersebut, yakni kinerja aparat atau petugas kepolisian yang mengawasi tertib lalu lintas di jalan raya. Peranan petugas keamanan lalu-lintas sangat penting dalam menanamkan disiplin lalu lintas. Tanpa adanya konsistensi dalam penegakan hukum bagi pelanggar lalu lintas, tertib lalu lintas hanya bersifat semu.

Namun, dalam kenyataannya, petugas kepolisian sering tergoda dengan denda-denda damai. Pada umumnya masyarakat lebih memilih denda damai ketimbang ditilang, karena dengan mengikuti proses tilang tersebut masyarakat justru menjadi kerepotan dan seringkali biaya yang dikeluarkan untuk keperluan proses tilang tersebut jauh lebih besar. Selain itu, pilihan untuk menghindari proses tilang ini juga didorong oleh sikap petugas itu sendiri ketika menangkap pelanggaran lalu lintas.

Cara lain yang dinilai efektif adalah penegakkan hukum secara tegas dengan pemberian sanksi-sanksi yang sesuai dengan ketentuan. Selain itu, kesadaran masyarakat akan pentingnya hukum juga menjadi cara yang efektif. Sebab tanpa adanya kesadaran tersebut maka peraturan tidak akan dapat berjalan dengan efektif.